



HARI INI DIPERIKSA, APAKAH NUSRON WAHID MANGKIR?

Jakarta | Harian Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi kasus ATR/BPN pada Rabu hari ini.

Halaman 11

NASIONAL

Terima Perwakilan Buruh, KSP Listyo Sigit Pastikan Implementasi UU Ketenagakerjaan

Halaman 2

POLITIK

Jokowi 'Lobi' Prabowo Usai MK Tolak Gugatan Gibran, Pemohon Singgung Pemakzulan di DPR

Halaman 4

BOLA

Laga Perpisahan, Messi Cetak Gol

Halaman 12

IoT Didorong Masuk Desa untuk Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) di pedesaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Meutya mengatakan, digitalisasi tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di perkotaan. Teknologi digital harus diterapkan secara langsung dalam berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin memastikan digitalisasi diterapkan langsung dalam use case di lapangan. Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden," kata Meutya dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi, Selasa (7/10).

Menurut dia, penerapan teknologi digital di desa sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu masyarakat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola sektor pertanian.

Salah satu contoh penerapan IoT, kata Meutya, dilakukan di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian melalui sensor tanah yang diberi nama Jinawi. Sensor tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital untuk membantu petani memperoleh informasi mengenai kondisi tanah sehingga pengelolaan pertanian dapat dilakukan secara lebih tepat.

Meutya menegaskan, pengembangan teknologi di tingkat desa harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menghadirkan infrastruktur teknologi, tetapi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan. ● (hmi)



Terima Perwakilan Buruh, KSP Listyo Sigit Pastikan Implementasi UU Ketenagakerjaan

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menerima 13 perwakilan kelompok buruh di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, membahas implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan usai disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

"Terima kasih atas perjuangan teman-teman buruh yang berjalan dengan aman, lancar, dan tertib," kata Sigit dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa tugas bersama selanjutnya, yakni memastikan regulasi tersebut dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Sigit mengharapkan kehadiran regulasi baru tersebut mampu meningkatkan produktivitas pekerja sekaligus memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Menurut dia, peningkatan produktivitas tersebut akan memicu daya saing nasional dalam berkompetisi dengan negara lain.

Langkah itu juga diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga



8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat pekerja menyampaikan hasil studi banding dan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan agar iklim industri nasional berjalan lebih kondusif.

Para pimpinan serikat juga menyatakan kesiapan untuk mendukung para pengusaha dalam menjaga daya saing industri tanah air.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri yang diinisiasi Sigit hingga akhirnya resmi masuk ke dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut.

"Ini kemajuan luar biasa, dan juga menjadi bukti konsistensi janji Presiden

Prabowo Subianto pada saat May Day dibuktikan," ujar Andi Gani.

Ia menyampaikan bahwa regulasi baru itu membawa banyak kemajuan dibandingkan aturan sebelumnya, seperti penghapusan outsourcing perorangan, jaminan pesangon, perbaikan indeks perhitungan upah serta larangan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang.

Sejumlah perwakilan organisasi buruh yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Konfederasi Serikat Bina Anti Penindasan (KSBI), dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiyo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Prabowo Ngaku Mau Disogok

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto membuat pengakuan mengejutkan soal praktik suap di lingkungan pemerintahan. Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkap bahwa dirinya ternyata tak luput dari upaya pihak tertentu yang hendak menyogoknya.

Prabowo bahkan menyebut tawaran suap tersebut bukan hanya terjadi sekali. Selama hampir dua tahun memimpin Indonesia, ia mengaku berkali-kali ditawarkan untuk menerima suap.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo awalnya menyinggung praktik korupsi yang masih menjadi persoalan serius dalam birokrasi. Ia menyebut praktik suap dapat menyasar pejabat dari berbagai level.

Namun, pernyataan Prabowo kemudian mengarah pada pengalaman pribadinya.

“Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok! Dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok,” ungkap Prabowo.

Pengakuan tersebut sontak menjadi sorotan. Sebab, meski menjabat sebagai Presiden sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, Prabowo mengaku tetap menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui jalur suap.

Prabowo tidak membeberkan

secara rinci siapa pihak yang menawarkan suap tersebut. Ia juga belum mengungkap nilai uang maupun bentuk pemberian yang ditawarkan kepadanya.

Prabowo: Mereka yang Menikmati Korupsi Akan Melawan

Prabowo menyadari pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Menurutnya, upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan akan berhadapan dengan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi dan kebocoran kekayaan negara.

Ia menyebut perlawanan dapat datang dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya

terganggu.

“Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi, unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan, unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara,” tegasnya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melakukan pembenahan. Ia menyebut pendekatan persuasif dan ajakan untuk kembali kepada kepentingan bangsa menjadi salah satu cara yang ditempuh.

Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kebocoran kekayaan negara berlangsung terus-menerus.

Pesan Keras untuk Menteri dan Kepala Badan

Prabowo juga memberikan pesan tegas kepada para pembantunya di pemerintahan.

Menurut dia, setiap kebijakan harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi rakyat dan kepentingan nasional, bukan untuk menguntungkan kelompok tertentu.

“Tidak ada lain! Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan,” kata Prabowo. ● (Agus)



Sah! DPR Resmi Ketok RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.

“RUU ini tidak hanya berhasil menyatukan dan menyelaraskan norma yang sebelumnya tersebar dan kerap memicu ketidakpastian, tetapi secara fundamental mengukuhkan pilar perlindungan ketenagakerjaan yang jauh lebih berkeadilan,” kata Yassierli dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.



Dia menyampaikan pemerintahan dan Komisi IX DPR RI telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembicaraan tingkat I atau pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara intensif, cermat, dan komprehensif, mulai dari 14 September hingga 4 Oktober 2026.

Menaker menyebutkan, RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan

RUU usul inisiatif DPR RI yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 27 Agustus 2026.

Atas hal itu, Presiden merespons secara cepat dan positif melalui Surat Presiden Nomor R-43/Pres/09/2026 tanggal 1 September 2026 dengan menunjuk tim menteri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI, dan Panja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan,” ucap Yassierli.

Ia menegaskan, pembenahan RUU itu tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ke-

tenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Setelah melalui dinamika pembahasan panjang yang sangat konstruktif, lanjut Menaker mengatakan, pemerintah menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai komitmen bersama dalam menghadirkan era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI, serta Panja Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan,” ucap Menaker. ● (Egi)



Tak Punya Ijazah Setara SMA, Denny Indrayana: Gibran Tak Bisa Maju Pilpres 2029

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut Gibran Rakabuming Raka tak bisa maju lagi dalam Pilpres 2029. Denny menyebut Gibran juga tak bisa mengikuti kontestasi pilkada karena tak memiliki ijazah atau bukti tamat belajar jenjang SMA atau sederajat.

"Selama beliau tidak kemudian mempunyai bukti tamat pendidikan SMA, maka beliau tidak bisa maju dalam posisi jabatan publik yang mensyaratkan pendidikan SMA. Kepala daerah, legislatif, apalagi Presiden, Wakil Presiden," kata Denny Indrayana usai putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Denny mengatakan Gibran bisa mendaftar jabatan pejabat publik jika mengikuti program paket C untuk memperoleh ijazah kelulusan SMA atau sederajat. Dia mengatakan banyak jabatan publik yang mensyaratkan ijazah SMA.

"Kecuali nanti punya mungkin Paket C ya, di tempat Bu Mensos. Beliau tidak bisa lagi mencalonkan diri, apakah Wali Kota Solo lagi, Gubernur Jawa Tengah kah, apalagi Wakil Presiden di 2029. Tidak bisa," ujarnya.

Dia mengatakan jika ditarik ke belakang, Gibran tak memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonan Wali Kota Solo. Dia mengatakan MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena keterlambatan pelantikan.

"Tetapi di situlah kemudian Mahkamah memilih menahan diri untuk tidak masuk ke ruang lebih politis kalau kemudian sampai dismissal meskipun lagi-lagi, seandainya dilakukan sebenarnya ruang pintunya ada. Tetapi Mahkamah memilih untuk tidak," kata Denny.

"Saya tentu punya preferensi, tetapi saya juga mengerti dan memahami kenapa Mahkamah menahan diri pada level tidak masuk setelah pelantikan," sambungnya.

Denny menyebut Gibran seharusnya mundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau sertifikat kelulusan lain yang bisa disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat. Dia mengatakan pihaknya akan bergerak ke DPR dalam waktu dekat untuk mendorong isu impeachment atau pemakzulan Gibran dengan dasar putusan MK. ● (Egi)

Jokowi 'Lobi' Prabowo Usai MK Tolak Gugatan Gibran, Pemohon Singgung Pemakzulan di DPR

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (6/10/2026) malam menjadi sorotan.

Pertemuan tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi diketahui mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.00 WIB.

Momen tersebut menjadi perhatian karena berlangsung pada hari yang sama dengan sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan persoalan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Sembilan hakim konstitusi akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

Dengan putusan tersebut, upaya pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran melalui jalur sengketa di MK tidak berujung pada



pencopotan jabatan wakil presiden.

Namun, polemik politik dan hukum terkait perkara tersebut belum sepenuhnya berakhir.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, menyatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang menurut pihaknya dapat ditempuh melalui jalur lain setelah putusan MK.

Salah satu opsi yang disinggung adalah membawa persoalan tersebut ke ranah politik melalui DPR.

Bambang menyebut peluang pemakzulan dapat menjadi salah satu konsekuensi yang dibahas apabila terdapat dasar konstitusional maupun hukum yang memenuhi syarat.

Pernyataan tersebut membuat isu mengenai posisi Gibran kembali bergeser dari arena peradilan konstitusi ke ranah politik ketatanegaraan.

Pemakzulan sendiri bukanlah proses yang dapat dilakukan secara langsung hanya karena adanya gugatan atau putusan pengadilan. Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional tersendiri dan melibatkan DPR serta lembaga negara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak serta-merta mengubah posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Di tengah situasi tersebut, pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara menjadi semakin menarik perhatian.

Belum diketahui secara pasti materi pembicaraan dalam pertemuan kedua tokoh tersebut. Hingga kini, tidak ada keterangan resmi yang menyebut bahwa pertemuan itu berkaitan langsung dengan putusan MK maupun isu mengenai Gibran.

Namun, timing pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi politik. Jokowi merupakan ayah Gibran, sementara Prabowo adalah pasangan Gibran dalam Pilpres 2024 dan kini menjadi Presiden RI.

Pertemuan keduanya terjadi pada saat isu mengenai legitimasi pencalonan Gibran kembali menjadi perdebatan publik.

Dengan putusan MK yang tidak menerima permohonan dan munculnya wacana membawa persoalan ke DPR, perkembangan isu tersebut kini berpotensi memasuki babak baru. ● (Agus)

Pengamat Desak Komisioner KPU Mundur dan Polisi Usut Dugaan Kejahatan Konstitusional

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak boleh berhenti sebagai putusan hukum semata.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai putusan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan persoalan administrasi dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024, termasuk dugaan kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dedi bahkan mendesak seluruh komisioner KPU yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri apabila terbukti mengetahui adanya persoalan dalam dokumen persyaratan calon.

“Putusan MK tidak dapat hanya dilihat sebagai putusan hukum, tetapi itu juga pintu masuk untuk mengusut semua pihak, termasuk KPU. Seluruh komisioner KPU yang bertanggung

jawab,” tegas Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Dedi, persoalan tersebut harus dilihat dari aspek pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Ia meminta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak mengabaikan dugaan pelanggaran administrasi apabila memang ditemukan unsur pidana.

“KPU telah mengetahui jika dokumen yang diserahkan Gibran bukanlah surat penyetaraan lulus pendidikan, maka mereka secara sadar lakukan kejahatan konstitusional, dan itu setara dengan berkhianat pada bangsa dan negara,” ujarnya.

Dedi menilai, jika dugaan tersebut terbukti secara hukum, persoalannya tidak lagi sekadar kesalahan administratif biasa. Sebab, dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden berkaitan langsung dengan proses demokrasi dan legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Karena itu, ia mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap proses verifikasi dokumen pencalonan Gibran



pada Pilpres 2024. Pemeriksaan tersebut, kata dia, perlu menjawab siapa yang memeriksa dokumen, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta apakah terdapat pihak yang mengetahui persoalan tersebut tetapi tetap meloloskannya.

Lebih jauh, Dedi meyakini Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto bersama jajarannya dapat mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan peny-

elenggaraan Pilpres 2024.

Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti. Jika ditemukan unsur pidana, maka siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada perdebatan politik. Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, maka harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan,” kata Dedi. ● (Agus)

Maruli soal Bursa Calon Panglima TNI: Semua Kepala Staf Calon



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi namanya yang santer disebut sebagai salah satu kandidat calon Panglima TNI.

Maruli mengatakan tidak

mempermasalahkan munculnya namanya dalam bursa calon Panglima TNI. Menurutnya, seluruh kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon Panglima TNI.

“Ya enggak apa-apa, kalau calon semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli

saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Maruli juga menanggapi beredarnya sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam bursa pergantian Panglima TNI. Ia menilai munculnya nama-nama tersebut merupakan hal yang biasa.

“Ya biasa,” ujarnya singkat.

Maruli menjabat sebagai KSAD sejak 29 November 2023. Ia menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kemudian dipercaya Presiden sebagai Panglima TNI.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akml) 1992 dari kecabangan Infanteri, khususnya Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra.

Sebelum menjabat KSAD, Maruli pernah menduduki

sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi KSAD adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Nama Maruli kembali menjadi sorotan setelah ia menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pemberian tanda kehormatan tersebut turut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan posisi di pucuk pimpinan TNI. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya.

● (hmi)

Jaksa Agung: PKH Selamatkan Uang Negara Rp13,24 Triliun

JAKARTA |
Harian Merdeka

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang sebesar Rp13,24 triliun dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada negara. Penyerahan tersebut dilakukan pada tahap kedelapan pada, Selasa (6/10/2026).

Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH mengatakan, uang tersebut diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

"Hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp13.241.335.681.910,13 kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, capaian tersebut menjadi



bukti kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut juga menunjukkan penegakan kewibawaan hukum serta upaya memastikan sumber daya negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata ke-

hadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata dia.

Uang Rp13,24 triliun terse-

but berasal dari sejumlah penerimaan. Rinciannya, hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741,13, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp1.537.574.234.271, serta penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898.

Selain penyerahan uang, Satgas PKH juga menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.

Burhanuddin menyampaikan, sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga 6 Oktober 2026, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.260.220,14 hektare.

Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare. ● (Egi)

Sidang Kasus Gas Portable, Terdakwa Bantah Suntik LPG 3 Kg dan Cabut BAP

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penyalahgunaan isi ulang gas portable dengan terdakwa Gabriel Lumbantoruan. Sidang hari ini memasuki agenda pemeriksaan terdakwa, di mana Gabriel secara langsung memberikan bantahan serta klarifikasi atas dakwaan yang dijatuhkan kepadanya di hadapan Majelis Hakim.

Dalam persidangan, Gabriel menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemindahan (penyuntikan) isi gas dari tabung LPG 3kg bersubsidi ke tabung gas portable. Ia menjelaskan bahwa seluruh tabung gas portable yang dipesan oleh pihak kepolisian sebanyak 37 tabung gas portable melalui metode pembelian terselubung (undercover buy) adalah barang yang dibeli langsung dari pihak luar dumi cikarang, bukan mengisi atau memindahkan isi gas LPG 3kg

ke kaleng gas portable.

Gabriel menyatakan tegas di depan persidangan bahwa ia melakukan pengisian ulang gas portable untuk dipakai sendiri di masa lalu, namun aktivitas tersebut hanya dilakukan untuk keperluan pribadi saat hendak naik gunung, bukan untuk tujuan komersial atau perniagaan. Adapun keterlibatannya dalam menjual gas portable yang dibeli dari luar semata-mata didorong oleh himpitan ekonomi. Sebagai buruh pabrik, upah minimum yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ia mencoba mencari pendapatan tambahan dengan mengambil selisih keuntungan sebesar Rp 2.000 per tabung dari penjualan gas portable luar tersebut.

Atas dasar fakta tersebut, terdakwa menyatakan BAP dan dakwaan penyalahgunaan gas portable sebagaimana diatur dalam UU Minyak dan Gas Bumi adalah tidak benar. Gabriel juga secara resmi mencabut seluruh keterangan dalam Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) yang dibuat saat diperiksa sebagai tersangka di kepolisian, dengan menegaskan bahwa isi BAP terkait tuduhan penyalahgunaan subsidi LPG 3kg tersebut tidak benar, maka yang benar adalah keterangan saya dipersidangan ini.

Keterangan Ahli Pidana Menilai Kasus Cacat Prosedur

Pernyataan terdakwa ini selaras dengan pandangan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pancasila, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., yang dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Dalam keterangannya, Dr. Rocky Marbun menyatakan bahwa proses hukum terhadap Gabriel mengandung cacat prosedur

dan kelemahan pembuktian yang mendasar.

Beberapa poin krusial yang dinyatakan oleh Dr. Rocky Marbun antara lain:

1. Kelemahan Metode Undercover Buy: Keterangan yang diperoleh dari skema pembelian terselubung oleh aparat harus dinilai secara objektif bersama alat bukti lain agar memenuhi prinsip keadilan pembuktian.

2. Dualisme Peran Aparat: Ahli menyoroti posisi anggota kepolisian yang menjalankan fungsi ganda secara berlebihan, mulai dari proses penangkapan hingga penyidikan, yang berpotensi mengurangi objektivitas perkara. ● (Egi)

Respons Sengketa Lahan Legok, Ini Langkah dan Koordinasi Kanwil BPN Banten

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Persoalan agraria yang melibatkan ribuan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menjadi sorotan. Konflik pertanahan yang salah satunya mencakup lima desa di Kecamatan Legok ini berakar dari klaim kepemilikan aset tanah oleh TNI Angkatan Darat (AD) C.q. Kodam Jaya/Jayakarta yang bersumber dari penyerahan Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) tahun 1950.

Akar Masalah dan Dampak di Wilayah Terdampak

Berdasarkan paparan resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, aset tersebut tercatat dalam IKN/SIMAK BMN dengan dua objek utama, yakni Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.39, No. Register 30506052, seluas sekitar ±955,36 hektare, serta Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.38, No. Register 30506050, seluas sekitar ±436,56 hektare.

Konflik semakin meruncing menyusul terbitnya Surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026 perihal Permohonan

Pemblokiran Persertipikatan yang Dilaksanakan Perorangan, Perusahaan, Maupun Instansi Lain Terhadap Aset Tanah Milik TNI AD di Kabupaten Tangerang. Akibat kebijakan ini, ruang gerak keberadaan masyarakat atas tanah yang telah dihuni secara turun-temurun mendadak lumpuh total.

Pemblokiran dan klaim tersebut berdampak luas pada Objek Pertama (±955,36 Ha), yang meliputi wilayah Kecamatan Legok khususnya Desa Serdang Wetan (±80 Ha), Rancagong (±190 Ha), Legok (±7,7 Ha), Babakan (±1,3 Ha), Palasari (±352 Ha), Kemuning (±122 Ha), Caringin (±122 Ha), dan Cirarab (±0,36 Ha). Sebanyak 58 sertifikat warga saat ini tertahan secara administratif akibat status blokir tersebut.

Langkah Strategis Kanwil BPN Banten dan Kesiapan GTRA

Menanggapi dinamika penyelesaian konflik ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di level daerah telah bergerak menindaklanjuti mandat penanganannya.



“Setelah Rapat Dengar Pendapat, ada tugas dari Komisi II untuk tingkat kementerian dan tugas GTRA di level daerah yang melibatkan Kanwil, Gubernur, Bupati, dan Kepala Kantor. GTRA sendiri telah kami laksanakan bahkan belum genap 30 hari, di mana forum ini tidak hanya membahas wilayah Legok tetapi juga berbagai lokasi lainnya,” ujar Harison.

Harison menegaskan bahwa pihaknya secara khusus memasukkan topik klaim aset TNI atau Kodam di wilayah Legok sebagai agenda prioritas dalam sidang GTRA. Keputusan strategis pun telah diambil agar Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang aktif berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

“Dalam GTRA diputuskan agar kepala kantor pertanahan dan Pemda Tangerang berkoordinasi untuk mempersiapkan verifikasi data, baik lapangan maupun data di kantor pertanahan, apabila tim lintas kementerian membutuhkan verifikasi kebutuhan di lapangan. Kami yang menyiapkan fasilitas tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kanwil BPN Banten juga menjaga komunikasi secara intensif dengan pihak Kodam Jaya untuk meminta data pendukung. Dengan kesiapan data yang dimatangkan di bawah koordinasi BPN Kabupaten Tangerang, pihaknya siap menyambut tim lintas kementerian manakala jadwal peninjauan lapangan telah ditentukan.

● (Egi)

Polres Metro Bekasi Kota Bantah Anggota Terlibat Pungli dan Kekerasan Tahanan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Polres Metro Bekasi Kota memberikan klarifikasi terkait viral postingan ‘uang koordinasi’ pembesuk di tahanan. Polisi menegaskan tak ada permintaan ‘uang koordinasi’ tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus, mengatakan Unit Paminal Sipropam Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait viral narasi tersebut.

Hasil pemeriksaan dan klari-

fikasi, Kompol Verdika menegaskan bahwa pungli tersebut bukan dilakukan oleh personel, melainkan oleh sesama tersangka yang ditahan.

“Terkait dugaan pungutan liar, dari hasil klarifikasi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh anggota kepolisian, melainkan oleh tersangka lain yang berada dalam satu sel dengan yang bersangkutan,” tegas dia.

Verdika juga mengklarifikasi soal narasi kekerasan yang dilakukan oleh personel. Hasil pemeriksaan Paminal, kata dia, tidak ada fakta maupun bukti yang mendukung dugaan tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut,

belum ditemukan fakta maupun bukti yang mendukung adanya dugaan tindakan kekerasan oleh anggota sebagaimana disampaikan dalam unggahan tersebut,” tambahnya.

Narasi tersebut viral di media sosial setelah sebuah akun mengaku diminta ‘uang koordinasi’ saat membesuk tahanan di Polres Metro Bekasi Kota. Dalam postingannya, wanita tersebut memperlihatkan screenshot WhatsApp dari seseorang yang meminta ‘uang koordinasi’.

Postingan lainnya memperlihatkan bukti pembayaran yang ditransfer via m-banking sejumlah Rp 1 juta. Uang tersebut ditransfer dua kali.

● (Egi)

TENGKU SYAIRA ANATAYA TAMPIL TANPA HIJAB

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Putri pasangan artis Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah, Tengku Syaira Anataya, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penampilannya saat mengenakan busana tanpa hijab menjadi sorotan di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (6/10/2026), Tengku Syaira tampak mengenakan atasan

bermotif bunga yang dipadukan dengan bawahan berwarna putih. Ia terlihat tampil santai dan percaya diri.

"Oh, you noticed?" tulis Tengku Syaira dalam keterangan unggahannya.

Penampilan tersebut langsung mendapat perhatian dari sejumlah warganet. Tak sedikit yang memberikan komentar positif dan memuji kecantikan Syaira.

"Kak mau pakai hijab atau gak tetap cantik," tulis salah satu warganet.

"Cantik banget bidadari," sahut warganet lainnya.

Sang ibunda, Cindy Fatikasari, juga turut meninggalkan komentar dalam unggahan tersebut. Ia men-

uliskan ungkapan kerinduan kepada putrinya.

"I miss u," tulis Cindy Fatikasari.

Unggahan Tengku Syaira pun mendapat beragam respons dari pengikutnya. Meski penampilannya kali ini berbeda dari sebelumnya, warganet tetap memberikan dukungan dan pujian terhadap putri Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah tersebut. ● (hmi)



Apel Perpisahan di Polda Sulbar, Irjen Adi Deriyan Kenang Momen Tugas Terindah

MAMUJU | **Harian Merdeka**

Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyampaikan pesan perpisahan dalam apel terakhirnya sebagai Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (7/10/2026). Dengan suasana haru, Adi Deriyan menyebut Sulbar sebagai salah satu tempat terindah dalam perjalanan kariernya.

Apel tersebut digelar di lapangan apel Polda Sulbar. Adi Deriyan berpamitan kepada seluruh personel setelah lebih dari setahun menjalankan tugas di Bumi Malaqbi.

Ia mengenang pertama kali menginjakkan kaki di Sulbar pada 19 Agustus 2025. Menu-rutnya, selama bertugas, ia

mendapat sambutan dan dukungan luar biasa dari seluruh personel Polda Sulbar.

“Tepat pada 19 Agustus 2025, pertama kali saya menginjakkan kaki di Polda Sulbar. Dalam kurun waktu satu tahun lebih ini, saya merasakan bagaimana rekan-rekan menerima saya dengan tangan terbuka dan memberikan bentuk kerja sama yang luar biasa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah ini,” kata Adi Deriyan.

Adi mengakui perjalanan memimpin Polda Sulbar tidak selalu berjalan mulus. Berbagai persoalan harus dihadapi bersama dengan semangat gotong royong.

“Ada ombak yang harus dilalui bersama, ada masalah yang ha-



rus dihadapi bergotong-royong, demi menggapai tujuan mulia yaitu melindungi dan mengabdikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan nada bergetar, Adi kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel yang telah mendukungnya selama menjalankan tugas.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keringat dan waktu yang telah kalian berikan. Saya pribadi, beserta keluarga, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga,” tuturnya.

Ia juga meminta maaf apabila selama memimpin Polda Sulbar terdapat perkataan maupun sikap yang tidak berkenan. Adi mengakui masih ada sejumlah keinginan dan janji yang belum sempat dituntaskan selama masa kepemimpinannya.

● (Egi)

Iklan Mini Merdeka

Pasang Iklannya Disini...!

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA

LOWONGAN KERJA

- Staff Administrasi
- Sales Marketing
- Kurir / Driver
- Operator Produksi

Kualifikasi:

- Pria/Wanita
- Umur 18 - 35 tahun
- Pendidikan min. SMA/SMK
- Disiplin & Berprestasi Jajad

UMAH DIJUAL
SIAP HUNI - LOKASI STRATEGIS

LT 80 m² | LB 70 m²

3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
1 Kamar Mandi

Harga Rp 650 Juta (Negotiable)

UMAH DISEWAKAN

3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
1 Kamar Mandi

Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAWLING DIJUAL

Luas mulai 100 - 500 m²

Akses jalan lebar

Lokasi strategis

SHM / Sertifikat

Harga Mulai Rp 3,5 Juta/m²

RUKO DIJUAL
COCOK UNTUK USAHA

LT 80 m² | LB 160 m²

2 Lantai

Lokasi strategis

Akses mudah

Rp 1,8 Miliar (Negotiable)

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN

Lokasi Premium

Fasilitas Lengkap

Keamanan 24 Jam

Dekat Pusat Kota

Harga Mulai Rp 450 Juta

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN

Lokasi Premium

Fasilitas Lengkap

Keamanan 24 Jam

Dekat Pusat Kota

Harga Mulai Rp 450 Juta

MOBIL BEKAS BERKUALITAS

Toyota Avanza 2022

Automatic

Kondisi prima

Pajak Hidup

Siap Pakai

Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA

Honda Beat 2023

Surat Lengkap

Kondisi prima

Pajak Hidup

Siap Pakai

Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS

Cash & Kredit

Proses Cepat

DP Ringan

Banyak Pilihan Unit

TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL SERVIS - SPAREPART - TUNE UP

Garasi, Tune Up, Ban, AC Mobil, Kelistrikan

SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS MOBIL - MOTOR

Suku Cadang Original & Aftermarket

Harga Terjangkau

Tersedia Berbagai Merek

AYO SHOLAT JUM'AT
DI MASJID JAMI' AL IKHLAS
MASJID TRANSIT 24 JAM

UNDANGAN TERBUKA

MAKAN NASI KEBULI MAKLUBAH GRATIS 150 PORSI

SELEMAN SHOLAT JUM'AT

Donasi Info: 0821-1113-1236

LES PRIVAT
SD - SMP - SMA

- Semua Mata Pelajaran
- Guru Berpengalaman
- Datang ke Rumah / Online
- Jadwal Fleksibel

KEHILANGAN

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1409/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Bustomi

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1404/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Syarkowi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Consumer Collection, Recovery And Asset Sales Division 2, Regional Loan Quality Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, terdapat sebagai berikut:

ABUL KHOR, sebidang Tanah berketil Bangunan dengan SHM No.01047 seluas 65 M2 terletak di Blok Kd No.15 (Sesuai Sertifikat), Setempat Dikelan Dengan Perumahan Grand Pesona Blok Kd No.15, Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atas nama ABUL KHOR.
(Batas Rp 151.081.000,-; Jaminan Rp 21.000.000,-).

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Open bidding melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id>
- Waktu Penawaran : Rabu, 21 Oktober 2026 Pukul 11:10 WIB (sesuai waktu server)
- Batas Akhir Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran: 21 Oktober 2026 Pukul 11:10 WIB (sesuai waktu server)
- Penetapan Penawaran Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Pelaksanaan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang; apabila tidak melalui maka uang jaminan langsung & ditorkan ke Kas Negara
- Bea Lelang Pembeli : 2% dari Harga Terjual Lelang
- Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, JL. Raya Serang-Cilegon Km.3, Lepak Serang E Auction Corner

Persyaratan Lelang :

- Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang (e-auction) dengan penawaran terbuka (open bidding) yang ditayangkan pada aplikasi Lelang pada alamat domain <https://lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat diatas, dengan meletakkan soft copy (scan) KTP, NPWP (jika terdapat), "Tg" (tanda tangan) dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut) apabila tidak ditung sebagai penangan. Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dan badan hukum wajib menggunakan Surat Kuasa dari Direksi, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam 1 file.
- Peserta Lelang wajib menyertakan uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang ditorkan harus sama dengan uang jaminan yang diserahkan dalam pengumuman ini dan diotor sekaligus (tidak dicicil) serta harus efektif diterima KPKNL. Seang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan harus ditorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit. Info dapat menghubungi BTN Cilegon Telp. (0254) 391766, Emil: (0858-7559-5487), Jssu (0838-9888-8830).

Cilegon, 07 Oktober 2026

Ttd,
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CONSUMER COLLECTION, RECOVERY AND ASSET SALES DIVISION 2 REGIONAL LOAN QUALITY JAKARTA 1

HARGA IKLAN KORAN DIGITAL/CETAK

1 Halaman FC

20 JUTA

1/2 Halaman FC

10 JUTA

1/4 Halaman FC

5 JUTA

LUMINOR

WHAT'S ON OCTOBER

021-344 7777 | luminorhulidace.com | luminor.penerangan



Bupati: ASN Aceh Barat Diminta Segera Isbat Nikah Jika Terlanjur Nikah Siri

MEULABOH | **Harian Merdeka**

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta aparatur sipil negara (ASN) yang telah terlanjur melakukan pernikahan siri agar segera melakukan itsbat nikah atau mencatatkan pernikahannya secara resmi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan sosial dan hukum di tengah masyarakat.

Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan, terdapat dua kasus ASN yang sempat digerebek masyarakat karena melakukan pernikahan siri. Hal itu terjadi lantaran masyarakat tidak mengetahui status pernikahan yang bersangkutan.

“Kemarin sudah ada dua kejadian (ASN) yang digerebek akibat nikah siri karena masyarakat tidak tahu,” kata Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil di Meulaboh, Selasa.

Menurut Tarmizi, ASN yang sudah terlanjur menikah siri diminta segera berkonsultasi dengan ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), atau para tengku untuk mendapatkan arahan mengenai langkah selanjutnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melarang ASN melakukan pernikahan siri. Larangan tersebut berkaitan dengan ketentuan disiplin ASN serta aturan pemerintah yang berlaku.

Namun, bagi ASN yang telah terlanjur menikah siri, pemerintah daerah meminta agar segera menyelesaikan administrasi dan legalitas pernikahan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

“Kalau sudah terlanjur, segera konsultasikan dengan ulama, MPU atau tengku agar dapat dilakukan pernikahan ulang secara sah dan tercatat,” ujarnya.

Tarmizi menilai pernikahan siri dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi perempuan. Status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN di Aceh Barat mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengambil keputusan menikah secara siri.

“Selain merugikan kaum perempuan, pernikahan secara siri oleh ASN tidak sesuai dengan anjuran agama karena sangat merugikan para pihak,” katanya. **(hmi)**



ASN Banten Dinilai Belum Disiplin, Gubernur Didesak Perkuat Reformasi Birokrasi

BANTEN |
Harian Merdeka

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Pamulang (Unpam), Rahman Faisal, S.S., M.M., menilai kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masih perlu diperbaiki.

Penilaian itu disampaikan Rahman dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar pada 1 Oktober 2026. Ia menyoroti sikap sejumlah ASN saat mengikuti upacara yang dinilai tidak mencerminkan kedisiplinan dan penghormatan terhadap agenda kenegaraan.

“Terlihat ASN Pemda Provinsi Banten ada yang sedang ngobrol, ngopi dan merokok. Ini sangat mencederai kepercayaan publik terhadap citra birokrasi, serta menunjukkan kurangnya integritas dan rasa hormat dalam mengikuti upacara,” ujar Rahman kepada *Harian Merdeka*, Selasa (7/10/2026).

Menurut dia, kedisiplinan ASN merupakan bagian penting dalam

mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Karena itu, ia meminta Gubernur Banten Andra Soni memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Rahman juga meminta Pemprov Banten memberikan apresiasi lebih besar kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Menurutnya, penerimaan pajak masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah sekaligus mendukung pembiayaan operasional pemerintahan, termasuk belanja pegawai.

Ia menyoroti pemberian penghargaan kepada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pegawai Pemprov Banten dalam rangka HUT ke-26 Provinsi Banten yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).

“Diketahui Andra Soni pernah menjadi Ketua DPRD Banten dan kini menduduki kursi Gubernur Banten yang dipilih masyarakat melalui mekanisme demokrasi lokal. Warga Banten taat membayar pajak untuk

membiayai program pemerintah daerah dan gaji ASN. Seharusnya keadaulatan rakyat juga layak mendapat apresiasi pada HUT ke-26 Provinsi Banten karena posisi kekuasaan tertinggi di daerah berada di tangan rakyat,” katanya.

Rahman mendorong Gubernur Banten agar tidak pilih kasih dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan seluruh ASN mematuhi aturan serta ketentuan disiplin.

Ia juga mengusulkan adanya program pembinaan khusus bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Menurutnya, pembinaan tersebut diperlukan untuk menanamkan kembali nilai tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Merosotnya kedisiplinan menjadi salah satu alasan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Sangat perlu mereka mendapatkan pembinaan disiplin secara serius, bahkan dapat melibatkan pelatihan kedisiplinan seperti yang diterapkan kepada siswa bermasalah, agar tertanam rasa tanggung jawab,” ujarnya. **(Rhm)**

Presiden JNE Ungkap JNE Terus Perkuat Layanan dan Digitalisasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Persaingan bisnis logistik di Indonesia semakin ketat seiring berkembangnya teknologi, munculnya pemain berbasis aplikasi, perang tarif jasa ekspedisi, serta perubahan perilaku konsumen. Di tengah kondisi tersebut, JNE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas layanan, jaringan, efisiensi operasional, dan transformasi digital.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, mengatakan perusahaan terus menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika industri logistik yang berkembang cepat.

Memasuki usia ke-36 tahun dengan semangat “Melesat Hebat”, JNE, kata Feriadi, terus memperkuat kualitas layanan dan kapabilitas perusahaan agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan.

“Strategi perusahaan dijalankan dengan mengedepankan inovasi, penguatan jaringan, peningkatan efisiensi operasional, serta penyempurnaan layanan secara berkesinambungan,” ujar Feriadi saat diwawancara jurnalis **Harian Merdeka**, Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, industri logistik saat ini tidak hanya menghadapi persaingan antarpelaku usaha. Perubahan teknologi dan pola konsumsi masyarakat juga



ikut memengaruhi arah bisnis.

Pelanggan kini semakin menuntut layanan pengiriman yang cepat, mudah, dan transparan. Kondisi tersebut membuat perusahaan logistik harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi agar mampu memenuhi ekspektasi pasar.

Tak Terjebak Perang Harga

Feriadi mengakui dinamika tarif jasa pengiriman menjadi salah satu bagian dari persaingan industri logistik. Namun, JNE memilih tidak semata-mata menjadikan harga sebagai satu-satunya faktor kompetisi.

Perusahaan, kata dia, berupaya menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan dengan menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, efisiensi operasional, inovasi, serta kebutuhan pasar.

“Perusahaan terus menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, efisiensi operasional, inovasi, dan kebutuhan pasar dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” jelasnya.

Strategi tersebut menjadi penting di tengah semakin banyaknya perusahaan logistik yang menawarkan layanan berbasis teknologi dan aplikasi.

JNE juga masih melihat peluang pertumbuhan industri logistik di Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia serta aktivitas perdagangan dan ekonomi yang terus berkembang di berbagai daerah dinilai menjadi ruang bagi penguatan jaringan dan kapabilitas layanan.

“Dengan karakteristik geografis Indonesia yang luas serta aktivitas perdagangan dan ekonomi yang terus berkembang di berbagai daerah, penguatan jaringan dan kapabilitas layanan tetap menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam merespons kebutuhan pasar,” kata Feriadi.

AI Mulai Diperkuat

Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), JNE juga terus mempelajari dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Feriadi mengatakan teknologi

digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperbaiki pengalaman pelanggan, sekaligus memperkuat pengelolaan proses bisnis.

AI, otomatisasi, analisis data, serta berbagai teknologi pendukung lainnya menjadi bagian dari inovasi yang terus dipeleajari dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Namun, transformasi digital tidak semata-mata dipandang sebagai proses menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin.

JNE justru menempatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan teknologi.

“Perusahaan terus mendorong pengembangan kemampuan karyawan agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi serta dinamika industri,” ujar Feriadi.

Dengan demikian, otomatisasi dan AI diarahkan untuk mendukung efektivitas proses bisnis sekaligus mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Investasi Teknologi Berkelanjutan

Untuk mendukung transformasi digital, JNE menyatakan terus mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan prioritas perusahaan. ● (Agus)

HARI INI DIPERIKSA

“Benar, hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW (Nusron Wahid) selaku Menteri ATR/BPN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, penyidik KPK ingin mendalami informasi dari Nusron terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga membuat terang konstruksi perkara.

“KPK meyakini NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Pantauan di gedung KPK, Nusron Wahid belum hadir hingga pukul 13.00 WIB.

Diketahui, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal

Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafik, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.

KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. ● (Egi)

LAGA PERPISAHAN, MESSI CETAK GOL

JAKARTA | Harian Merdeka

Usai sudah kisah Lionel Messi bersama Timnas Argentina. La Pulga menutupnya dengan kemenangan 3-0 melawan Benin di laga persahabatan.

Argentina vs Benin berlangsung di Stadion Monumental, Buenos Aires, Rabu (7/10/2026) pagi WIB. Argentina menang 3-0.

Seluruh gol tercipta di babak kedua. Messi membuat assist untuk gol Nicola

Otamendi di menit ke-48.

Nico Paz menyumbang gol dalam laga ini. Pemain muda Argentina itu merobek gawang Benin dengan memanfaatkan assist Messi di menit ke-61.

Lionel Messi akhirnya bisa menciptakan gol tera-

akhirnya untuk Argentina. Dia mencetak gol melalui eksekusi penalti di menit ke-71.

Tak ada gol tercipta sampai laga tuntas. Perjalanan Messi dengan Timnas Argentina pun selesai. ●



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**